

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LEBONG 2014



INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN LEBONG

2014



**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN LEBONG
2014**

HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) OF LEBONG REGENCY 2014

ISBN : 978-602-6853-12-7
Katalog BPS / *BPS Catalog* : 4102002.1707
Nomor Publikasi / *Publication Number* : 17070.1504
Ukuran Buku / *Book Size* : 21,59 cm x 27,94 cm
Jumlah Halaman / *Number of Pages* : viii + 49 Halaman

Naskah / *Manuscript* :

Seksi Statistik Sosial BPS

Division of Social Statistical BPS

Gambar Kulit / *Cover Design* :

Seksi Statistik Sosial BPS

Division of Social Statistical BPS

Diterbitkan Oleh / *Published by* :

© BPS Kabupaten Lebong/*Statistics of Lebong Regency*

Dicetak Oleh / *Printed by* :

BPS Kabupaten Lebong/*Statistics of Lebong Regency*

Boleh Dikutip Dengan Menyebut Sumbernya

May be Cited With Reference to the Source

KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia adalah suatu proses pembangunan yang bertujuan agar setiap manusia mempunyai lebih banyak pilihan, khususnya dalam kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), serta dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh indikator Pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyajian angka IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi maupun disparitas antar daerah. Dengan ini, maka diharapkan agar daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk. Semoga publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong Tahun 2014 ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan.

Tubei, Oktober 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Lebong



Yulian Efendi, SE

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KETERANGAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1.PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
BAB 2.METODOLOGI	6
2.1. Metode Penghitungan.....	6
2.2. Komponen IPM	9
2.3. Klasifikasi/Pengelompokan IPM	13
2.4. Sumber Data IPM.....	15
BAB 3.GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG	16
3.1. Keadaan Geografis	16
3.2. Penduduk	17
3.3. Kesehatan	18
3.4. Pendidikan	23
3.5. Potensi Ekonomi	27

BAB 4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LEBONG	31
4.1. Indeks Kesehatan.....	32
4.2. Indeks Pendidikan	34
4.3. Indeks Pengeluaran	36
4.4. Indeks Pembangunan Manusia.....	38
4.5. Perbandingan IPM Antar Kabupaten/Kota	39
 BAB 5. PENUTUP	 42
5.1. Kesimpulan.....	42
5.2. Implikasi Kebijakan	43

<https://lebongkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Nilai Maksimum, Nilai Minimum dan Range Pencapaian Indikator Komponen IPM.....	8
Tabel 2. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum di Kabupaten Lebong Tahun 2014.....	21
Tabel 3. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Lebong Tahun 2014.....	22
Tabel 4. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Lebong Tahun 2014.....	23
Tabel 5. Banyaknya Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2014.....	26
Tabel 6. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah Yang Dimiliki di Kabupaten Lebong Tahun 2014.....	26
Tabel 7. Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan Kabupaten Lebong Tahun 2011-2014.....	33
Tabel 8. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lebong Tahun 2011-2014.....	34

Tabel 9.	Indeks Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2011-2014.....	35
Tabel 10.	Indikator dan Indeks Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lebong Tahun 2011-2014.....	37
Tabel 11.	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kabupaten Lebong Tahun 2011-2014.....	39
Tabel 12.	Angka IPM dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2014.....	40

<https://lebongkab.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lebong	17
Gambar 2. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Lebong Tahun 2014	20
Gambar 3. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2014	25
Gambar 4. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lebong Tahun 2011-2014	29
Gambar 5. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Lebong Tahun 2011-2014	30



Bab I

Pendahuluan

<https://lebongkab.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur melalui berhasilnya pembangunan fisik, melainkan juga pencapaian dalam pembangunan non fisik. Jika keberhasilan pembangunan fisik bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita, maka pembangunan non fisik lebih menekankan pada aspek pembangunan manusia. Dalam menghadapi pasar bebas seperti saat ini, sangat diperlukan sumber daya manusia yang mampu bersaing ketat di dalamnya. Untuk itu, pemerintah perlu lebih memfokuskan pada pembangunan yang terpusat pada manusianya sendiri.

Seiring reformasi pembangunan, tampak bahwa paradigma pembangunan di dunia telah bergeser. Pergeseran paradigma ini bertolak dari kenyataan bahwa pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jika dilihat dari perubahan konsep di dunia, pada awal dekade 70-an banyak pendapat mengemukakan bahwa pertumbuhan produksi merupakan syarat bagi kesejahteraan masyarakat, namun hasilnya belum memadai. Pada dekade itu juga ditekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution-growth development*). Selanjutnya pada awal dekade 80-an muncul paradigma

pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need development*), dan akhir-akhir ini sejak tahun 90-an paradigma pembangunan terpusat pada aspek manusia (*human centered development*).

Dalam konteks tersebut, UNDP (*United Nations Development Programme*) menganggap bahwa pembangunan manusia dapat dilihat sebagai proses upaya agar penduduk memperoleh “perluasan pikiran” dan sekaligus sebagai taraf kehidupan yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan/keterampilan tersebut. Konsep pembangunan manusia ini lebih luas pengertiannya dibanding konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pembangunan sumber daya manusia.

Manusia merupakan subyek dan sekaligus obyek dari pembangunan. Sebagai subyek dari pembangunan artinya manusia sebagai pelaku dari jalannya roda pembangunan disuatu daerah. Sedangkan manusia sebagai obyek dari pembangunan artinya manusia menjadi faktor yang dituju dari beberapa pembangunan yang ada untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan upaya untuk meningkatkan kehidupan yang lebih layak bagi penduduk di suatu daerah, yaitu melalui perencanaan program-program pembangunan daerah.

Sebagaimana dinyatakan dalam *Human Development Report (HDR)* pertama yang dipublikasikan oleh UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Di antara pilihan tersebut, pilihan terpenting adalah untuk berumur panjang, sehat, berilmu pengetahuan dan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar hidup secara layak.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan berbagai aspek meliputi produksi, distribusi komoditas, peningkatan kemampuan manusia dan secara bersamaan mengakomodir berbagai isu di masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, perdagangan, kebebasan berpolitik, serta isu gender ataupun nilai-nilai kultural. Menurut HDR, ada empat komponen penting dalam paradigma pembangunan manusia, yaitu produktifitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Dalam pelaksanaannya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan terhadap hasil pembangunan manusia diperlukan suatu ukuran tertentu. Ukuran atau indikator tersebut sifatnya haruslah angka tunggal (indikator komposit) yang dapat menggambarkan berbagai indikator tertentu.

Sejak tahun 1990, UNDP telah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. Pengukuran IPM difokuskan pada tiga dimensi yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia

yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living standards*).

UNDP merekomendasikan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara secara minimal direfleksikan dengan tingkat pemenuhan tiga unsur, yaitu peluang berumur panjang dan sehat, berpengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk mendayagunakan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif. Berdasarkan tiga unsur tersebut, maka diperoleh indikator-indikator berupa angka harapan hidup (*life expectancy at age 0*) yang mengukur tingkat kesehatan masyarakat, harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) untuk mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan, serta pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity-ppp*) yang merupakan ukuran pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. IPM itu sendiri merupakan indeks komposit dari ketiga indikator di atas.

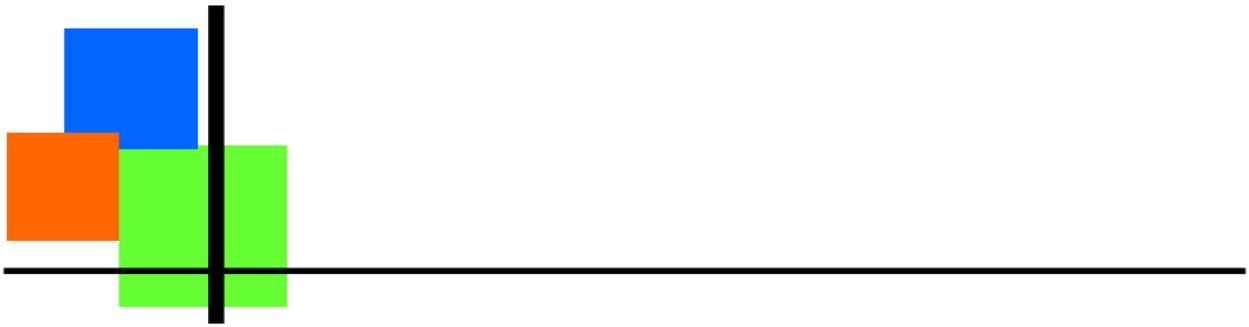
Mulai tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metode baru, dimana angka melek huruf dewasa (*adult literacy rate*) pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*), pada penghitungan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang sebelumnya menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita dan juga metode penghitungan diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk harus selalu dievaluasi menggunakan berbagai indikator. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu kajian analisis kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk. Oleh karena itu, maksud dan tujuan pengukuran IPM Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

1. Mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
2. Sebagai salah satu alat ukur kinerja suatu daerah, terutama dalam hal evaluasi proses pembangunan sumber daya manusia.
3. Sebagai alat untuk mempersiapkan kemajuan pembangunan antar kabupaten di suatu wilayah tertentu.
4. Sebagai input dan output terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan.
5. Sebagai salah satu indikator dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU).
6. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti, cendekiawan, pelaku ekonomi dan konsumen data dalam pelaksanaan riset maupun sumber pustaka.

7. Sebagai bahan kajian yang bersifat analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk.
8. Tersedianya berbagai indikator pembangunan manusia yang berguna dalam pelaksanaan evaluasi dan perencanaan pembangunan yang berjajar dengan indikator pertumbuhan ekonomi daerah.
9. Sebagai acuan penajaman prioritas pembangunan. Artinya, perubahan pola penganggaran pembangunan yang selama ini menggunakan aturan kesepakatan dari pihak penentu ke pola pembangunan yang lebih memihak orang banyak. Dengan demikian, kegiatan pembangunan lebih diarahkan pada aspek efisiensi dan efektivitas anggaran.



Bab II

Metodologi

<https://lebongkab.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI

2.1. Metode Penghitungan

Mulai tahun ini Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan metode baru. Penggunaan metode baru ini dikarenakan 2 alasan, yaitu : Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf disebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Alasan kedua adalah penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah disuatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Dalam metode baru ini yang berubah adalah Indikator Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah dan juga Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu metode penghitungan juga

mengalami, yaitu Metod Agregasi dengan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Dengan menggunakan metode baru ini ada beberapa keunggulan yang dimiliki, yaitu : Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dan juga PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu juga dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan bahwa pencapaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Metode baru digunakan oleh BPS dalam menghitung IPM ini sama dengan Standar *United Nations Development Programme (UNDP)*.

IPM diperoleh melalui dua tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung indeks masing-masing komponen pembentuk IPM, meliputi Indeks Kesehatan ($I_{kesehatan}$), Indeks Pendidikan ($I_{pendidikan}$) dan Indeks Pengeluaran. Adapun rumus penghitungan indeks masing-masing komponen IPM adalah:

$$Indeks X_i = \frac{(X_i - X_{min})}{(X_{maks} - X_{min})}$$

Keterangan:

X_i = Indikator Komponen IPM ke- i ($i = 1,2,3$)

X_{min} = Nilai Minimum dari X_i

X_{maks} = Nilai Maksimum dari X_i

Besarnya nilai minimum dan maksimum adalah berdasarkan standar dari UNDP dan akan menghasilkan menghasilkan angka $0 < Indeks (X_i) < 1$.

Tabel 1. Nilai Maksimum, Nilai Minimum dan Range Pencapaian Indikator Komponen IPM

Indikator	Satuan	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup saat Lahir	Tahun	20	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		1.007.436* (Rp)	26.572.352** (Rp)

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

2. Menghitung IPM dengan menggunakan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran menggunakan rumus :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Keterangan:

$I_{kesehatan}$ = Indeks Kesehatan

$I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan, yaitu : $1/2 I_{HLS}$ (Indeks Harapan Lama Sekolah) + $1/2 I_{RLS}$ (Indeks Rata-Rata Lama Sekolah)

$I_{pengeluaran}$ = Indeks Pengeluaran

2.2. Komponen IPM

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran. Komponen penyusun indeks-indeks tersebut meliputi Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per kapita disesuaikan.

a. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)

Angka Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, dimana AHH ini

dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan . AHH ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Semakin baik kesehatan maka kecenderungan hidup lebih lama akan semakin tinggi dan juga sebaliknya semakin buruk kesehatan maka kematian akan semakin dekat.

Untuk menghitung AHH digunakan metode tidak langsung dengan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur penghitungan angka harapan hidup sejak lahir (AHH_0) dilakukan dengan menggunakan *Software Mortpack* (metode *trussel* dengan model *west*).

Setelah mendapatkan angka harapan hidup sejak lahir, selanjutnya dihitung Indeks Kesehatan ($I_{kesehatan}$) yaitu dengan membandingkan angka tersebut dengan angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini UNDP atau BPS telah menetapkan nilai minimum dan nilai maksimum untuk angka harapan hidup yaitu masing-masing 20 tahun dan 85 tahun). Formula Indeks Kesehatan adalah sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Keterangan:

AHH = Angka Harapan Hidup Tahun ke- t

AHH_{min} = Angka Harapan Hidup Minimum (20)

AHH_{max} = Angka Harapan Hidup Maksimum (85)

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

b.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun keatas.

Setelah mendapatkan rata-rata lama sekolah, selanjutnya dihitung Indeks Rata-rata Lama Sekolah (I_{RLS}) yaitu dengan membandingkan angka tersebut dengan angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini UNDP atau BPS telah menetapkan nilai minimum dan nilai maksimum untuk rata-rata lama sekolah yaitu masing-masing 0 tahun dan 15 tahun). Formula Indeks Rata-rata Lama Sekolah adalah sebagai berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Keterangan:

RLS = Rata-rata Lama Sekolah Tahun ke- t

RLS_{min} = Rata-rata Lama Sekolah Minimum (0)

RLS_{max} = Rata-rata Lama Sekolah Maksimum (15)

b.2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Setelah mendapatkan angka harapan lama sekolah, selanjutnya dihitung Indeks Harapan Lama Sekolah (I_{HLS}) yaitu dengan membandingkan angka tersebut dengan angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini UNDP atau BPS telah menetapkan nilai minimum dan nilai maksimum untuk harapan lama sekolah yaitu masing-masing 0 tahun dan 18 tahun). Formula Indeks Harapan Lama Sekolah adalah sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Keterangan:

- HLS = Harapan Lama Sekolah Tahun ke- t
 HLS_{min} = Harapan Lama Sekolah Minimum (0)
 HLS_{maks} = Harapan Lama Sekolah Maksimum (18)

b.3. Indeks Pendidikan (Indeks RLS + Indeks HLS)

Untuk memperoleh Indeks Pendidikan, Indeks Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Harapan Lama Sekolah dijumlahkan kemudian dibagi 2 sehingga diperoleh formula Indeks Pendidikan ($I_{\text{Pendidikan}}$) sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pendidikan } (I_{\text{Pendidikan}}) = \frac{1}{2} (I_{\text{RLS}} + I_{\text{HLS}})$$

c. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan metode Rao.

2.3. Klasifikasi/Pengelompokan IPM

Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, besaran angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan menjadi empat kategori sbb:

1. $IPM < 60$: IPM Rendah
2. $60 \leq IPM < 70$: IPM Sedang

3. $70 \leq \text{IPM} < 80$: IPM Tinggi
4. $\text{IPM} \geq 80$: IPM Sangat Tinggi

Selain itu, untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhannya, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Adapun formula penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1}}{\text{IPM}_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t = Indeks Pembangunan Manusia tahun ke t

IPM_{t-1} = Indeks Pembangunan Manusia tahun ke $t-1$

2.4. Sumber Data IPM

Sumber data dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu :

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010-SP2010,

Proyeksi Penduduk)

- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional-SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS
- Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah

<https://lebongkab.dps.go.id>



Bab III

Gambaran Umum

<https://lebongkab.bps.go.id>

BAB 3

GAMBARAN UMUM

3.1. Keadaan Geografis

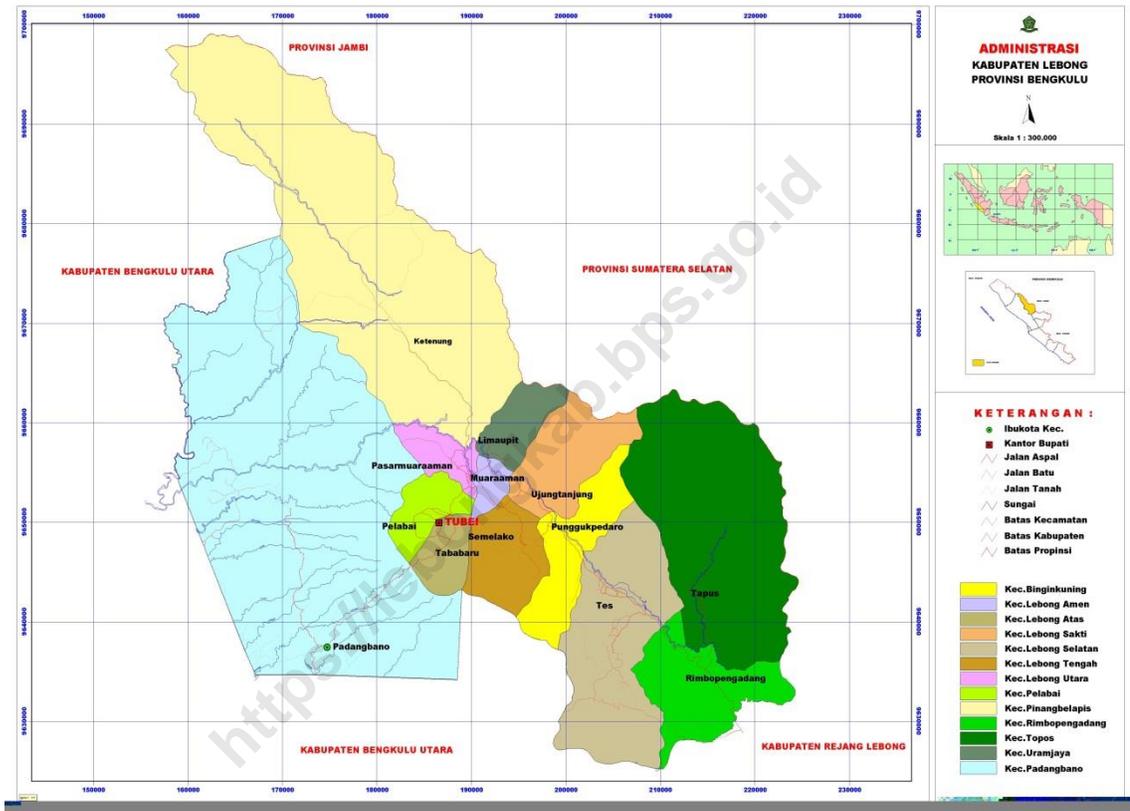
Kabupaten Lebong terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Wilayah Kabupaten Lebong sendiri pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Lebong terletak di sebelah barat pegunungan barisan dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah timur, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah selatan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah baratnya.

Kabupaten Lebong memiliki luas wilayah, yaitu 166.527,63 Ha, yang terdiri dari 13 kecamatan yaitu Kecamatan Topos, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Pinang Belapis, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Pelabai dan Kecamatan Padang Bano.

Ibukota Kabupaten Lebong terletak di Tubei yang berada di Kecamatan Pelabai dan pusat perekonomiannya terletak di Kecamatan Lebong Utara. Wilayahnya terbagi menjadi 102 desa dan 11 kelurahan. Berdasarkan

topografinya, hampir separuh wilayah Kabupaten Lebong terletak di dataran tinggi, yaitu pada ketinggian di atas 500 meter.

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lebong



3.2. Penduduk

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Lebong adalah 107.296 orang. Jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 54.815 orang dan penduduk perempuan sebanyak 52.481 orang dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,447.

3.3. Kesehatan

Salah satu indikator penting yang dapat dijadikan salah satu ukuran dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah kesehatan. Pentingnya kesehatan dan gizi tercermin dari Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam rangka tercapainya hidup sehat. Selanjutnya, tujuan utama pembangunan di bidang kesehatan antara lain adalah menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya status gizi penduduk. Peningkatan taraf kesehatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas penduduk yang bekerja.

a. Status Kesehatan

Dilihat dari status kesehatan, persentase penduduk Kabupaten Lebong yang mempunyai keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari adalah sebesar 30,96 persen, hal ini dilihat dari hasil SUSENAS 2014. Bila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu yang sebesar 29,96 persen, artinya tingkat keluhan kesehatan di Kabupaten Lebong relatif lebih tinggi. Pilek dan panas merupakan jenis keluhan kesehatan terbanyak di Kabupaten Lebong di tahun 2014, yaitu sebesar 6,72 persen dan 3,01 persen.

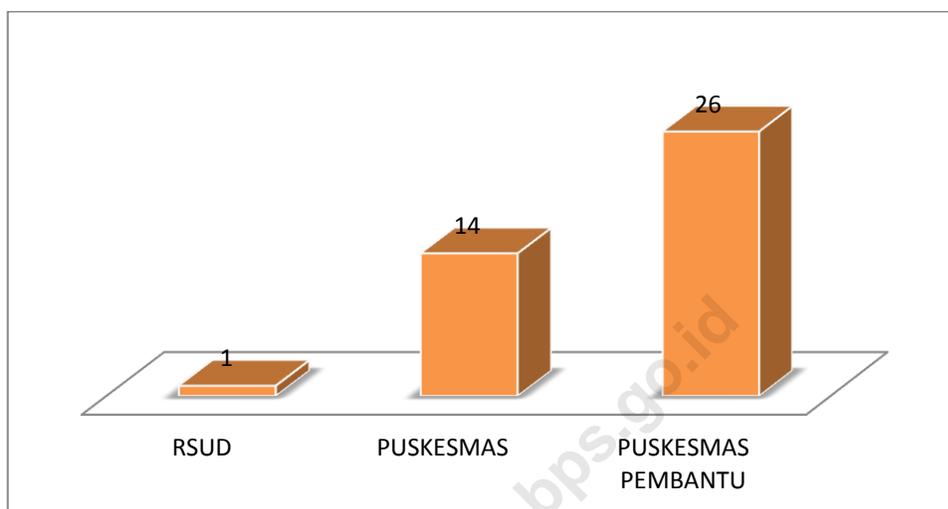
b. Akses Pada Fasilitas Kesehatan

Dilihat dari akses terhadap fasilitas kesehatan, pada tahun 2014 fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Lebong, yaitu : 1 unit rumah sakit umum, 14 unit puskesmas dan 26 unit puskesmas pembantu yang tersebar di 13 kecamatan. Akses terhadap fasilitas kesehatan tersebut menjadi penting karena akan mempengaruhi derajat kesehatan dari masyarakat.

Penduduk Kabupaten Lebong memiliki derajat kesehatan yang terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup. Angka harapan hidup Kabupaten Lebong tahun 2014 sebesar 62,01 sama dengan tahun 2013 dan tahun 2012 yang sebesar 62,01 tahun. Perbaikan kualitas kesehatan dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat itu sendiri maupun peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang kesehatan.

Indikator yang dapat dijadikan gambaran mengenai akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang pernah berobat jalan ataupun mengobati sendiri. Berdasarkan hasil SUSENAS 2014, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan mengobati sendiri dalam satu bulan terakhir di Kabupaten Lebong adalah sebesar 68,15 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan pernah berobat jalan dalam satu bulan terakhir adalah 38,36 persen. Besarnya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan pengobatan sendiri mungkin disebabkan karena ketidakmampuan secara ekonomi untuk membiayai jasa kesehatan yang memang tidak murah.

Gambar 2. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Lebong Tahun 2014



Sumber : Lebong Dalam Angka 2015

Hal lain yang mendorong penduduk melakukan pengobatan sendiri mungkin karena penyakitnya dianggap tidak tergolong berat sehingga cukup dengan membeli obat yang tersedia di warung atau toko obat.

c. Fasilitas Perumahan dan Air Minum

Kondisi tempat tinggal juga menjadi salah satu indikator peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil SUSENAS 2014, persentase rumah tangga di Kabupaten Lebong yang menggunakan fasilitas listrik PLN adalah sebesar 95,46 persen, listrik non PLN sebesar 0,95 persen dan sisanya menggunakan petromaks, senter dan lainnya.

Rumah tangga di Kabupaten Lebong yang memiliki fasilitas air minum sendiri adalah sebesar 73,29 persen; 11,23 persen menggunakan fasilitas air

minum secara bersamaan serta sisanya umum dan tidak memiliki fasilitas air minum. Berdasarkan sumber air minum, 23,19 persen dari sumur tak terlindung; 20,57 persen rumah tangga menggunakan sumber air minum dari mata air terlindung; 19,53 persen berasal dari ledeng, dan sisanya berasal dari sumber air minum lainnya.

Tabel 2. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum di Kabupaten Lebong Tahun 2014

SUMBER AIR MINUM	PERSENTASE
(1)	(2)
Ledeng	19,53
Pompa	4,29
Sumur Terlindung	5,43
Sumur Tak Terlindung	23,19
Mata Air Terlindung	20,57
Mata Air Tak Terlindung	13,06
Air Sungai	4,54
Air Kemasan	9,38
Lainnya	0,00

Sumber : SUSENAS 2014

Jika dilihat dari jenis lantai terluas, pada umumnya rumah penduduk telah memiliki rumah dengan lantai bukan tanah/bambu yaitu sebesar 99,55 persen dan 0,45 persen dengan lantai tanah. Adapun untuk persentase rumah

tangga berdasarkan jenis dinding terluas dan tempat pembuangan akhir tinja dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut.

Tabel 3. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Lebong Tahun 2014

Jenis Dinding	Persentase
(1)	(2)
Tembok	19,00
Kayu	36,91
Bambu	43,39
Lainnya	0,69

Sumber : SUSENAS 2014

Tabel 4. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Lebong Tahun 2014

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Persentase
(1)	(2)
Tangki/SPAL	21,03
Kolam/Sawah	1,06
Sungai/Danau/Laut	59,12
Lobang Tanah	15,37

Pantai/Kebun/Tanah Terbuka	0,00
Lainnya	3,42

Sumber : SUSENAS 2014

3.4. Pendidikan

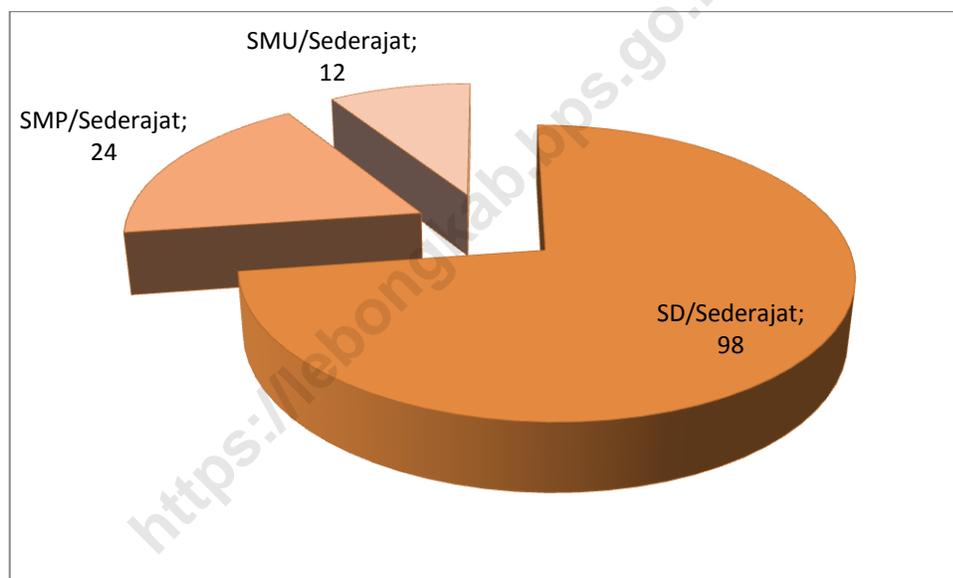
Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan faktor mendasar kemajuan suatu bangsa dan tidak semata-mata tergantung pada keunggulan sumber daya alamnya. SDM yang bermutu dalam pengertian teknis, kemampuan, keahlian, keterampilan serta nilai-nilai modern lainnya tetap diperlukan dan akan menjadi prasyarat mutlak untuk dapat mencapai keunggulan bagi suatu bangsa.

Pergeseran struktur masyarakat juga memiliki dampak mendasar dan berimplikasi terhadap terjadinya transisi kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Pergeseran struktur masyarakat dari struktur tradisional ke struktur industri ditandai dari berkurangnya jenis pekerjaan pada sektor pertanian dan bertambahnya jenis pekerjaan pada sektor industri.

Ke depannya, jenis pekerjaan tradisional yang mengandalkan keterampilan motoris akan tergantikan oleh jenis pekerjaan yang berlandaskan pada otomatisasi dan pengolahan informasi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki profil pendidikan sudah merupakan suatu gejala universal. Pendidikan adalah suatu bentuk investasi yang produktif dan dipandang sebagai sarana untuk memasuki lingkungan kerja yang bersifat modern.

Untuk melihat sejauh mana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lebong sudah mencapai sasaran, dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator, di antaranya adalah ketersediaan sekolah, tenaga pengajar, serta jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Gambar 3. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2014



Sumber : Lebong Dalam Angka 2015

Berdasarkan Gambar 3 di atas terlihat bahwa jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Lebong tahun 2014 adalah 98 buah SD, 24 buah SMP dan 12 buah SMU/SMK baik swasta maupun negeri. Sebagian besar sekolah-sekolah tersebut terletak di Kecamatan Lebong Utara dan Kecamatan Lebong Selatan.

Selain melihat jumlah sekolah, ketersediaan tenaga pengajar juga harus diperhatikan karena kualitas siswa berhubungan positif dengan kualitas dan

kuantitas guru. Penyebaran tenaga guru yang merata baik di daerah pedesaan maupun perkotaan juga akan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Tabel 5 berikut menunjukkan bahwa pada tahun 2014 jumlah guru di Kabupaten Lebong mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 5. Banyaknya Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Tahun		
	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	1102	728	1063
SMP	331	356	476
SMU	189	183	172
SMK	113	125	149

Sumber : Lebong Dalam Angka 2015

Tabel 6. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah Yang Dimiliki di Kabupaten Lebong Tahun 2014

Ijazah Yang Dimiliki	Persentase
(1)	(2)
Tidak Punya Ijazah	24,78
SD/Sederajat	28,19
SMP/Sederajat	22,96
SMU/Sederajat	20,40

DI, DII, DIII Akademi	1,09
Universitas/S2/S3	2,58

Sumber : SUSENAS 2014

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator dampak yang menggambarkan tingkat pendidikan yang dicapai (ditamatkan) penduduk 10 tahun ke atas yang pernah sekolah. Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Lebong pada tahun 2014 sebagian besar masih tamat SD, yaitu 28,19 persen. Persentase penduduk yang berpendidikan tamat SMU – S3 sebanyak 24,07 persen dan penduduk yang tidak berijazah sebanyak 24,78 persen.

3.5. Potensi Ekonomi

Pada tahun 2014 perekonomian Kabupaten Lebong mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Lebong tahun 2014 sebesar Rp. 2.114.028.100.000,- yang mengalami peningkatan sebesar 13,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 1.870.422.900.000,-. PDRB ADHB Kabupaten Lebong tahun 2014 masih didominasi oleh Sektor Pertanian. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebanyak 43,83 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lebong tahun

2014. Sektor-sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar antara lain Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,19 persen, Sektor Konstruksi sebesar 8,49 persen, dan sisanya tersebar di berbagai sektor ekonomi lainnya.

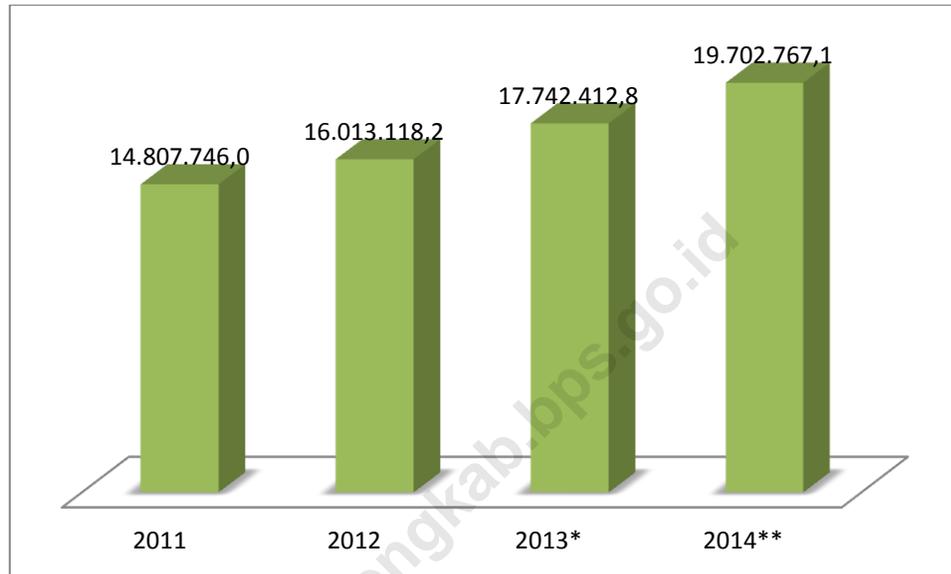
Bila dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK), pada tahun 2014 Kabupaten Lebong juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu sebesar 5,59 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2014 mengalami percepatan 0,03 persen.

Pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Lebong tahun 2014 juga mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor yang paling besar mengalami pertumbuhan adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,82 persen. Selanjutnya, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 9,48 persen. Kemudian diikuti oleh Sektor Industri Pengolahan yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,00 persen.

- **PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lebong**

Gambar 4. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Lebong Tahun 2011-2014



*) Angka Sementara

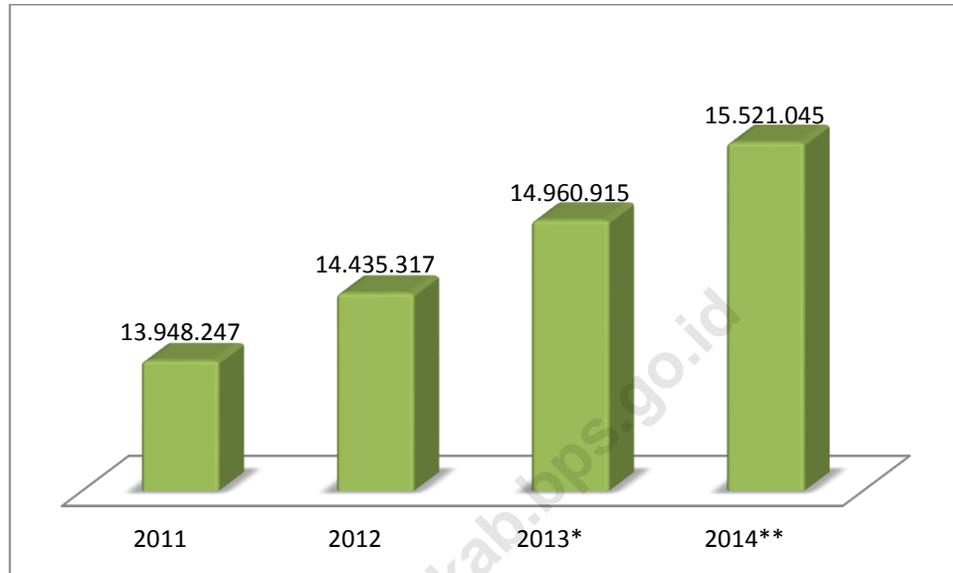
***) Angka Sangat Sementara

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebong Menurut Lapangan Usaha 2010 – 2014

Bila dilihat dari gambar 4, berdasarkan nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lebong, secara umum nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk Kabupaten Lebong tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013. Pada tahun 2013 PDRB per kapita penduduk Kabupaten Lebong sebesar Rp. 17,7 juta sedangkan pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 11,05 persen menjadi Rp. 19,7 juta.

- **PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lebong**

Gambar 5. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lebong Tahun 2011-2014

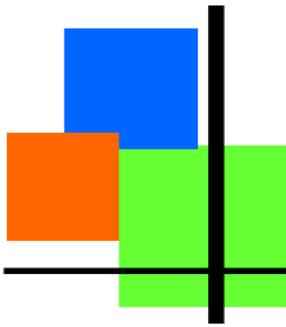


*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebong Menurut Lapangan Usaha 2010 – 2014

Bila dilihat dari gambar 5, nilai PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010, maka pertumbuhan nyata ekonomi penduduk Kabupaten Lebong tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 3,75 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 14,9 juta rupiah di tahun 2013 menjadi 15,5 juta rupiah di tahun 2014.



Bab IV

IPM Kabupaten Lebong

<https://lebongkab.bps.go.id>

BAB 4

IPM KABUPATEN LEBONG

Peningkatan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan merupakan kerangka pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan nasional ini menempatkan manusia sebagai titik sentral sehingga mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai suatu sumber daya. Salah satu badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *United Nations Development Programme (UNDP)* melakukan pengukuran kinerja pembangunan manusia melalui suatu ukuran komposit yang diberi nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan keterampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak.

Dalam perspektif pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, IPM tidak memasukkan aspek pembangunan moral dan penanaman budi luhur bangsa ke dalam sistem nilai yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya alasan teknis yaitu sulit mengukur aspek tersebut dan formula penghitungan menjadi tidak sederhana. Namun demikian, dalam memberikan pengukuran tunggal dan sederhana dari upaya pembangunan, penggunaan indeks ini cukup memadai.

IPM merupakan indikator gabungan dari beberapa indikator yaitu indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator ekonomi. Indikator kesehatan tercermin dalam Indeks Kesehatan, indikator pendidikan tercermin dalam Indeks Pendidikan dan indikator ekonomi tercermin dalam Indeks Daya Beli. Ketiga indikator dasar tersebut dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah.

Mulai tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metode baru, dimana angka melek huruf dewasa (*adult literacy rate*) pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*), pada penghitungan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang sebelumnya menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita dan juga metode penghitungan diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

4.1. Indeks Kesehatan

Dalam hal perbandingan antar indikator komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dapat dilakukan suatu tinjauan secara parsial, artinya tingkat pembangunan baru diukur dari satu komponen.

Pada tahun 2014 angka harapan hidup sejak lahir di Kabupaten Lebong adalah sebesar 62,01 tahun dengan Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 0,646. Hal ini berarti rata-rata umur penduduk di Kabupaten Lebong sampai dengan meninggal adalah 62,01 tahun. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten

Lebong pada tahun 2014 sama dengan tahun 2012 dan 2013 tetapi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang memiliki AHH 62,00 tahun, artinya bahwa pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Lebong telah memberi dampak positif pada perbaikan umur hipotesis yang semakin panjang.

Selain itu, faktor yang memberikan sumbangan positif dalam meningkatnya angka harapan hidup adalah kesadaran masyarakat dalam membudayakan pola hidup sehat. Pergeseran nilai budaya tradisional menuju hidup sehat yang lebih modern akan menentukan kemampuan mental dan fisik penduduk.

Tabel 7. Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan Kabupaten Lebong Tahun 2011-2014

Kab/Provinsi	Angka Harapan Hidup (AHH)				Indeks Kesehatan			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Lebong	61,95	62,00	62,00	62,00	0,6462	0,6464	0,6464	0,6464
Bengkulu	67,98	68,16	68,33	68,37	0,7382	0,7409	0,7435	0,7441

4.2. Indeks Pendidikan

Pada tahun 2011 hingga 2014 rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) penduduk Kabupaten Lebong menunjukkan adanya peningkatan, yaitu: 7,35 pada tahun 2011; 7,35 pada tahun 2012; 7,35 pada tahun 2013 menjadi

7,62 pada tahun 2014 dengan indeks sebesar 0,508 di tahun 2014. Angka ini menggambarkan bahwa dengan rata-rata bersekolah antara 7 sampai 8 tahun, berarti sumber daya manusia di Kabupaten Lebong masih tergolong rendah.

Pada tahun 2014 Indeks Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 0,508; hal ini menunjukkan bahwa secara umum penduduk Kabupaten Lebong yang berpendidikan formal sebesar 50,8 persen dari seluruh pendidikan yang harus dijalani yaitu 15 tahun. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan menggalakkan program yang mampu menumbuhkan kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan formal sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Tabel 8. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Lebong Tahun 2011-2014

KAB/PROVINSI	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
LEBONG	7,35	7,35	7,35	7,62	10,86	10,96	11,07	11,39
BENGGULU	7,93	8,01	8,09	8,28	11,88	12,20	12,78	13,01

Pada tahun 2011 hingga 2014 harapan lama sekolah lama sekolah (*expected years of schooling*) penduduk Kabupaten Lebong menunjukkan adanya peningkatan, yaitu: 10,86 pada tahun 2011; 10,96 pada tahun 2012; 11,07 pada tahun 2013 menjadi 11,39 pada tahun 2014 dengan indeks sebesar 0,633 di tahun 2014. Angka ini menggambarkan bahwa lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak umur 7 tahun ke atas di Kabupaten Lebong terus

meningkat dan juga menunjukkan bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan terus meningkat.

Pada tahun 2014 Indeks Harapan Lama Sekolah sebesar 0,633; hal ini menunjukkan bahwa secara umum peluang anak berusia 7 tahun ke atas di Kabupaten Lebong untuk mencapai lamanya pendidikan hingga 18 tahun adalah sebesar 63,3 persen. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan meningkatkan pembangunan sistem pendidikan di berberbagai jenjang.

Tabel 9. Indeks Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pendidikan Kabupaten Lebong Tahun 2011-2014

Kab/Provinsi	Indeks Rata-rata Lama Sekolah				Indeks Harapan Lama Sekolah				Indeks Pendidikan			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Lebong	0,490	0,490	0,490	0,508	0,603	0,609	0,615	0,633	0,547	0,550	0,552	0,570
Bengkulu	0,529	0,534	0,539	0,552	0,660	0,678	0,710	0,723	0,594	0,606	0,625	0,637

Dari hasil penghitungan Indeks Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Harapan Lama Sekolah diperoleh suatu indeks gabungan, yaitu Indeks Pendidikan. Indeks ini mampu menggambarkan keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lebong. Besarnya Indeks Pendidikan di Kabupaten Lebong tahun 2014 mencapai 0,570; lebih tinggi dibanding tahun 2013 sebesar 0,552; tahun 2012 sebesar 0,550 dan tahun 2011 sebesar 0,547.

Kondisi ini hampir sama dengan Indeks Pendidikan rata-rata penduduk Provinsi Bengkulu.

4.3. Indeks Pengeluaran

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (*UNDP menggunakan indikator PNB per kapita riil yang telah disesuaikan/adjusted real GNP per capita*) karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara. Besaran nilai Indeks Pengeluaran menunjukkan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilai Indeks Pengeluaran mengindikasikan tingkat pendapatan yang semakin besar sehingga tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik.

Tabel 10. Indikator dan Indeks Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Kabupaten Lebong Tahun 2011-2014

Kab/Provinsi	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rp)				Indeks Pengeluaran			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Lebong	9601	9914	10132	10210	0,689	0,699	0,705	0,708

Bengkulu	8572	8682	8803	8864	0,654	0,658	0,662	0,665
----------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lebong terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat melalui besaran pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, pada tahun 2011 sebesar 9,601 juta rupiah meningkat menjadi 9,914 juta rupiah pada tahun 2012 dan meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 10,132 juta rupiah kemudian menjadi 10,210 juta rupiah ditahun 2014. Besaran tersebut menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Lebong.

Dalam hal perbandingan mengenai rata-rata penduduk Provinsi Bengkulu, baik tahun 2011 – 2014, kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Lebong masih berada di atas rata-rata provinsi. Selain itu, pencapaian Indeks Pengeluaran juga mempunyai pola yang sama dengan indikator pengeluaran riil per kapita dengan perubahan indeks tahun 2011 (0,689), tahun 2012 (0,699), tahun 2013 (0,705) dan tahun 2014 (0,708).

4.4. Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah dan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mencapai kondisi yang ideal. Hasil penghitungan angka IPM Kabupaten Lebong ternyata termasuk dalam kategori sedang menurut skala internasional.

IPM Kabupaten Lebong tahun 2011 sebesar 62,43 meningkat pada tahun 2012 menjadi 62,84 meningkat pada tahun 2013 menjadi 63,15 dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi 63,90 dimana pada empat tahun tersebut berada dalam kategori sedang. Sama halnya dengan rata-rata penduduk Provinsi Bengkulu yang juga termasuk dalam tingkat pembangunan manusia yang sedang.

Nilai IPM Kabupaten Lebong sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, ternyata IPM dari komponen kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita mengalami kenaikan dalam empat tahun terakhir.

Tabel 11. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kabupaten Lebong Tahun 2011-2014

Kab/Provinsi	IPM			
	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lebong	62,43	62,84	63,15	63,90
Bengkulu	65,96	66,61	67,50	68,06

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian

sebelumnya. Pertumbuhan IPM Kabupaten Lebong tahun 2014 adalah sebesar 1,19 lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada tahun 2013 yang hanya 0,49. Hal ini menggambarkan bahwa semakin cepat IPM Kabupaten Lebong untuk mencapai nilai maksimalnya.

4.5. Perbandingan IPM Antar Kabupaten/Kota

Pada tahun 2014 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong berada pada peringkat ke-delapan dari sepuluh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, yang meningkat dibandingkan tahun 2013 yang berada pada peringkat ke-sembilan. Angka IPM tertinggi adalah di Kota Bengkulu yaitu sebesar 76,49; disusul oleh Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara dengan angka IPM masing-masing sebesar 68,28 dan 67,27.

Tabel 12. Angka IPM dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2014

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPM		Peringkat	
		2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1700	BENGKULU	67,50	68,06	20	20
1701	Bengkulu Selatan	67,61	68,28	2	2
1702	Rejang Lebong	66,11	66,55	4	4
1703	Bengkulu Utara	66,67	67,27	3	3
1704	Kaur	63,17	63,75	8	9

1705	Seluma	62,10	62,94	10	10
1706	Mukomuko	64,79	65,31	5	5
1707	Lebong	63,15	63,90	9	8
1708	Kepahiang	64,44	65,22	6	6
1709	Bengkulu Tengah	63,71	64,10	7	7
1771	Kota Bengkulu	76,16	76,49	1	1

Provinsi Bengkulu sendiri memiliki angka IPM di tahun 2014 sebesar 68,06 termasuk ke dalam provinsi yang memiliki angka IPM sedang dan berada pada peringkat 20 dari 34 provinsi di Indonesia. Bila dibandingkan dengan peringkat sebelumnya, posisi ini tidak mengalami perubahan.



Bab V

Penutup

<https://lebongkab.bps.go.id>

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pembangunan manusia di Kabupaten Lebong pada tahun 2014 relatif lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong pada tahun 2014 (63,90) yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,19 dibandingkan tahun 2013 (63,15). Pertumbuhan angka IPM ini seiring dengan peningkatan seluruh komponen pembentuk IPM yang ada di Kabupaten Lebong. Indeks Kesehatan ($I_{\text{Kesehatan}}$) pada tahun 2014 sama dengan tahun 2012 dan tahun 2013, yaitu 0,6464 tetapi mengalami peningkatan 0,0002 dibanding tahun 2011 (0,6462). Indeks Pendidikan ($I_{\text{Pendidikan}}$) pada tahun 2014 (0,570) mengalami peningkatan sebesar 0,018 dibanding tahun 2013 (0,552), dibanding tahun 2012 (0,550) mengalami peningkatan 0,021 dan juga mengalami peningkatan 0,024 dibanding tahun 2011 (0,547). Indeks Pengeluaran ($I_{\text{Pengeluaran}}$) tahun 2014 (0,708) meningkat sebesar 0,002 dibanding tahun 2013 (0,705), meningkat 0,009 dibanding tahun 2012 (0,699) dan meningkat 0,019 dibanding tahun 2011 (0,689).

Pada tahun 2014, Angka Harapan Hidup penduduk Kabupten Lebong adalah 62,01 yang berarti rata-rata umur penduduk sampai dengan meninggal adalah 62,01 tahun. Rata-rata Lama Sekolah adalah 7,62 yang berarti rata-rata

penduduk bersekolah antara 7-8 tahun. Harapan Lama Sekolah adalah 11,39 yang berarti lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh anak 7 tahun ke atas adalah 11,39 tahun.

Berdasarkan peringkat IPM, Pada tahun 2014 Kabupaten Lebong berada pada peringkat ke-delapan dari sepuluh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Selain itu, besaran IPM Kabupaten Lebong pada tahun 2014 termasuk kategori sedang, sama halnya dengan IPM Provinsi Bengkulu yang juga termasuk kategori sedang.

Oleh karena itu, dengan melihat angka IPM ini dapat dijadikan indikator dalam mengevaluasi jalannya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebong.

5.2. Implikasi Kebijakan

Dengan melihat hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan komponen-komponen penyusunnya, dapat dibuat sebuah rancangan mengenai peningkatan kesejahteraan penduduk melalui upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan secara umum. Dan untuk peningkatan daya beli penduduk merupakan dampak berantai dari peningkatan kesehatan dan pendidikan penduduk secara berkesinambungan.

Peningkatan kesehatan penduduk dapat dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara hidup sehat, berupa upaya pencegahan dan upaya pengobatan baik tradisional maupun modern.
2. Meningkatkan ketersediaan obat-obatan modern yang terjangkau oleh masyarakat.
3. Meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan terutama berupa revitalisasi Posyandu dan layanan Puskesmas baik keliling maupun biasa.
4. Menggalakkan program-program yang mampu menekan angka kematian bayi dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.
5. Memperbaiki mutu lingkungan hidup atau pemukiman sekaligus menanamkan kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan pemukiman untuk mengurangi penyebaran penyakit.

Peningkatan pendidikan dapat dilakukan dengan cara :

1. Penajaman sasaran wajib belajar sembilan tahun melalui berbagai jalur.
2. Khusus mengenai upaya pemberantasan buta huruf melalui kejar Paket A, agar dapat dijaga kemampuan peserta yang telah lulus dengan adanya kegiatan lanjutan seperti kelompok pembaca. Dengan demikian, kemampuan membaca dapat tetap terjaga di samping merupakan upaya pembekalan ilmu pengetahuan yang berkesinambungan.

3. Penyediaan dan penyebaran guru berdedikasi dan berkualitas perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah karena guru merupakan tulang punggung bagi pembentukan pelajar yang berkualitas.
4. Adanya peningkatan sarana dan prasarana transportasi sebagai penunjang akses masyarakat dalam menjangkau pendidikan formal.

Dalam hal perekonomian, perbaikan terhadap daya beli masyarakat tidak terlepas dari peningkatan pendapatan. Jika peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan terjadi secara berkesinambungan, hal ini berarti juga telah terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang nantinya diharapkan terciptanya generasi-generasi muda yang siap bersaing di era globalisasi.

Selain itu juga, peningkatan pendapatan juga tidak terlepas dari berkembangnya dunia usaha dan semakin baiknya iklim investasi untuk menciptakan peluang-peluang usaha. Untuk itu, hendaknya pemerintah Kabupaten Lebong mampu menjadi pemicu berkembangnya perekonomian daerah dengan menghidupkan dunia usaha pada berbagai sektor ekonomi dengan melihat potensi daerah yang dimiliki.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG**

Jl. Dua Jalur Komplek Perkantoran, Tubei
Website :lebongkab.bps.go.id, e-mail :bps1707@bps.go.id,
Telp : (0738) 2200032

